

**ANALISIS ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DI
KOTA SAMARINDA SEBAGAI NONGOVERNMENTAL
ORGANIZATION (NGO'S): PERSPEKTIF SEJARAH
DAN RUANG LINGKUP**

***ANALYSIS OF THE INDONESIAN RED CROSS ORGANIZATION (PMI)
IN SAMARINDA CITY AS A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
(NGO): HISTORICAL PERSPECTIVE
AND SCOPE***

Raka Roby Saputra, Shorea Helminasari, Trisna Waty Riza Eryani, Mia Sarmiasih

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Email: rakarobysaputra@gmail.com

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Email: Shorea@uwgm.ac.id

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Email: trisanariza@gmail.com

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Email: miasarmiasih@gmail.com

Diterima: 21 Juni 2024; Direvisi: 10 Juli 2024; Disetujui: 11 Desember 2024

ABSTRACT

This research describes the scope of the Indonesian Red Cross (PMI) as a Non-Governmental Organization (NGO) in Samarinda City, to understand the organization's role by its objectives and identify supporting and inhibiting factors in implementing organizational activities. This research uses qualitative methods emphasizing active observation by researchers, collecting related data, determining key informants and informants, and interviews with community beneficiaries of PMI activities. The research results show that PMI is a voluntary and independent humanitarian organization. Even though it often collaborates with the government and is officially recognized, PMI is not part of the government. The organization operates based on the basic principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement, which include independence, neutrality, and voluntarism. However, the public's understanding of PMI is limited to blood donation services and they consider PMI to be a government-owned organization, even though the Indonesian Red Cross is a humanitarian organization with legal entity status. This organization is included in organizations that come from outside the government or are known as NGOs. PMI's activities include assistance to victims of armed conflict and security disturbances, blood donation services, volunteer development, education and training related to the Red Cross, dissemination of Red Cross activities, disaster management, health and social services, and community empowerment in Red Cross activities. This research also identifies various factors that support and hinder PMI in carrying out its activities in Samarinda City, which can be used as a basis for increasing the effectiveness and efficiency of the organization's operations in the future.

Keywords: *History, Scope, Duties and Functions, Non-Governmental Organization (NGO), Indonesian Red Cross (PMI) Samarinda City, .*

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan ruang lingkup Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai *Non Governmental Organization (NGO)* di Kota Samarinda, dengan tujuan untuk memahami peran organisasi sesuai dengan tujuannya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada observasi aktif oleh peneliti, pengumpulan data terkait, penetapan key informan dan informan, serta wawancara dengan masyarakat penerima manfaat dari kegiatan PMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMI adalah organisasi kemanusiaan yang bersifat sukarela dan independen. Meskipun sering bekerja sama dengan pemerintah dan diakui secara resmi, PMI bukan merupakan bagian dari pemerintah. Organisasi ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang mencakup kemandirian, kenetralan, dan kesukarelaan. Namun, pemahaman masyarakat tentang PMI terbatas pada pelayanan donor darah dan mereka menganggap PMI sebagai organisasi milik pemerintah. Padahal Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum. Organisasi ini masuk kedalam organisasi yang berasal dari luar pemerintah atau dikenal dengan *NGO*. Kegiatan PMI meliputi bantuan kepada korban konflik bersenjata dan gangguan keamanan, pelayanan donor darah, pembinaan relawan, pendidikan dan pelatihan terkait kepalangmerahan, penyebaran kegiatan kepalangmerahan, penanganan bencana, pelayanan kesehatan dan sosial, serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kepalangmerahan. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung dan menghambat PMI dalam menjalankan kegiatannya di Kota Samarinda, yang dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi di masa depan.

Kata kunci: Sejarah, Ruang Lingkup, Tugas dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda, .

PENDAHULUAN

Salah satu isu yang menarik adalah isu mengenai kemanusiaan, setiap negara atau masyarakat harus memberikan hak pada setiap orang yang bernyawa atau hidup, pada hal ini menekankan pada Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia atau yang di kenal luas sebagai HAM sendiri merupakan Hak Hidup yang dimiliki semua manusia dari lahir hingga meninggal yang harus di lindungi dari negara atau siapapun itu (Beigbeder, 2023). Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi kemanusiaan yang bersifat sukarela dan independen, dengan tujuan utama melindungi dan menyelamatkan nyawa serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Samarinda, PMI menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan yang mencakup bantuan kepada korban konflik bersenjata, pelayanan donor darah, pembinaan relawan, pendidikan dan pelatihan terkait kepalangmerahan, serta penanganan bencana. Namun, meskipun PMI telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, terdapat beberapa masalah yang menghambat efektivitas dan efisiensi operasionalnya.

Salah satu isu utama yang dihadapi oleh PMI di Kota Samarinda adalah pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai peran dan fungsi PMI. Sebagian besar masyarakat hanya mengenal PMI sebagai organisasi yang melakukan kegiatan donor darah dan mendistribusikan darah, serta menganggap PMI sebagai organisasi milik pemerintah. Padahal, PMI adalah organisasi swasta yang beroperasi secara independen dan memiliki cakupan internasional. Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum. Organisasi ini masuk kedalam organisasi yang berasal dari luar pemerintah atau dikenal dengan *Non Governmental Organization (NGO'S)*. Namun, persepsi yang keliru ini mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat terhadap berbagai kegiatan PMI di luar donor darah, seperti bantuan kepada korban bencana dan pendidikan kepalangmerahan. Selain itu, PMI Kota Samarinda juga menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan sumber daya. Meskipun memiliki sejumlah relawan yang berdedikasi, keterbatasan dana dan fasilitas sering kali menghambat pelaksanaan program-program PMI secara optimal. Keberlanjutan program dan kegiatan PMI sangat bergantung pada donasi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta menjalin kerjasama yang lebih

erat dengan berbagai stakeholder. Dalam konteks regulasi, PMI diatur oleh beberapa peraturan hukum, seperti Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1950 mengenai pengesahan keberadaan PMI dan KEPPRES No. 246 tahun 1963 mengenai pemberian pertolongan dan bantuan kepada korban bencana. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan menetapkan bahwa PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum. Meskipun demikian, implementasi peraturan ini di lapangan sering kali menghadapi kendala administratif dan birokrasi, yang dapat memperlambat respon PMI dalam situasi darurat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ruang lingkup PMI sebagai *Non Governmental Organization* (NGO) di Kota Samarinda, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PMI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan fungsi PMI, serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional PMI dalam melayani masyarakat Kota Samarinda.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada konteks ini penulis akan memberikan kajian literature mengenai Organisasi internasional, dapat berupa *International Governments Organization* (IGO) dan *International Non Government Organization* (INGO). Berdasarkan dari awal pembentukannya lebih mengatur dan mengkoordinasikan segala kegiatan yang ada di setiap negara anggota, maupun bukan anggota organisasi internasional tersebut, karena setiap terbentuknya organisasi internasional lebih bertujuan kepada kepentingan bersama dan juga cangkupan kegiatannya lebih luas (Suardi, Azmi, & Daulay, 2023). Sedangkan pendirian suatu organisasi nasional atau lokal berawal dari pemikiran dari warga suatu negara maupun mengikuti dari organisasi internasional yang telah ada terlebih dahulu hadir, sehingga menjadi beberapa bentuk organisasi nasional yang ada saat ini seperti, GO dan NGO kemudian ada yang memiliki naungan internasional maupun tidak memiliki naungan internasional biasa di sebut LSM lokal. Contohnya. LSM UKM lokal dan sebagainya yang dimana cangkupan kegiatannya lebih meliputi satu negara atau satu wilayah saja. (Forsythe, 2024) ; (Izotov, & Obydenkova, 2023).

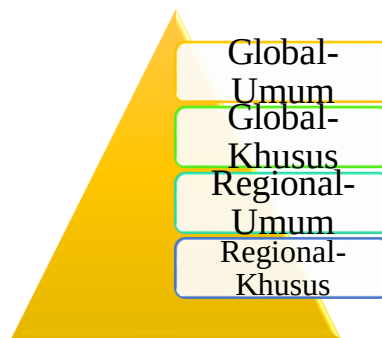
Governmental Orgazitation (GO'S)

Negara merupakan gabungan dari berbagai sistem kemasyarakatan, bentuk dari sebuah organisasi yang meliputi suatu wilayah, provinsi, kota, Kesukuan, Kelompok masyarakat dan lainnya pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah.

Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan segera. pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Organisasi pemerintahan merupakan suatu bentuk organisasi publik non profit yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. pemerintah memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanajer, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Dalam organisasi pemerintahan terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan lembaga negara, agar setiap organisasi pemerintahan negara dapat melaksanakan tugas secara proporsional, baik, dan efektif. pada akhirnya organisasi pemerintah bergerak sebagaimana fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Yang dimana setiap menjalankan kegiatan kenegaraan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang ada di setiap negara atau wilayah kekuasaan.

Non Governmental Organization (NGO'S)

Aall & Helsing, (2021); Muhrel, (2024). Organisasi non pemerintah dapat bersifat organisasai internasional yang disebut *International Non Governmental Organization (INGO'S)* dan dapat pula hanya *Non Governmental Organization (NGO'S)* saja. Perbedaannya hanya pada keanggotaan organisasi, mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa status suatu organisasi sebagai NGO yang bersifat intra-nasional (didalam negara saja), tidaklah menghambat organisasi itu beserta tokoh-tokohnya untuk dikenal secara internasional, contohnya, Nahdatul Ulama (NU) sebagai suatu organisasi massa (ORMAS) di indonesia. Tokoh NU, Abdurahman Wahid ternyata sering diundang ke berbagai pertemuan internasional, dan banyak pandanganya yang menjadi perhatian di negara-negara lain. Selain itu, NGO dapat pula bersifat (INGO) dengan ruang lingkup terbatas *regional* saja. Sebagaimana diuraikan di muka ada beberapa bentuk-bentuk organisasi internasional, baik IGO maupun INGO, berdasarkan cakupan secara internasional (Canton, 2021); (Lewis, Kanji, & Themudo, 2020);(Reuter, 2024).



Gambar 1
Bentuk-bentuk organisasi Internasional

Sumber: Dikelola penulis dari Canton, (2021); Lewis, Kanji, & Themudo, (2020);(Reuter, 2024).

Jadi, ada NGO yang ruang lingkupnya global dan NGO yang ruang lingkupnya regional. Hanya, pada umumnya NGO bergerak di bidang-bidang yang khusus saja. Kemudian dalam pengertian secara sederhana NGO dapat dibagi menjadi beberapa satuan kegiatan antara lain:



Gambar 2
Bentuk-bentuk Non Governmental Organization (NGO'S)

Sumber: Dikelola penulis dari Canton, (2021); Lewis, Kanji, & Themudo, (2020);(Reuter, 2024).

Non Governmental Organization (NGO'S) yang keberadaannya ada disalah satu negara atau wilayah harus melakukan pendaftaran organisasi kenegara agar tidak bertentangan dengan tujuan suatu negara. Organisasi non pemerintah ini memiliki tujuan yang berbeda-beda pula, organisasi juga dapat berupa organisasi profit dan non profit, biasanya organisasi ini lebih mementingkan kepentingan banyak orang bukan hanya anggotanya saja. Sengupta, & Joshi, (2024). Organisasi non pemerintah menjalankan kegiatannya lebih kepada kesadaran masyarakat atau individu untuk turut serta menjalankan organisasi tersebut, saat ini masyarakat kenal sebagai *Volunteer* (relawan), relawan pun berjalan sesuai dengan keperluan suatu organisasi yang di mobilisasi untuk menyelesaikan sebuah kegiatan tertentu. Relawan sendiri merupakan ujung tombak dari setiap kegiatan yang ada diorganisasi (Okada, Ishida, Yamauchi, Grönlund, Zhang, & Krasnopolskaya, 2021).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif melalui kajian eksploratif. Peneliti menggunakan metode seperti wawancara mendalam dengan informan yang relevan, observasi langsung di lokasi, serta pengumpulan data melalui dokumen dan laporan yang mendukung. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling di mana peneliti fokus pada individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang fenomena yang dikaji. Data yang terkumpul diorganisasi dan dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini didukung oleh Creswell (2002) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setingkat partisipan, analisis data secara induktif, menggabungkan data yang persial kedalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Selain itu, Menurut Moleong (2018) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah”. Adapaun dengan ini maka penelitian membuat kerangka berfikir yang sistematis agar penelitian ini lebih terarah dan analisis bisa mendalam. Adapun sebagai berikut:

Bagan 1 Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Dikelola Penulis, (2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Pendirian PMI Kota Samarinda Menurut SK

Berdasarkan temuan dan observasi mendalam bahwa dalam sejarahnya tidak ditemukan dokumen tentang pembentukan dan pengesahan kepengurusan PMI Kota Samarinda. Namun demikian, dari dokumen yang tersedia, Berdasarkan SK Pengurus Daerah PMI Kalimantan Timur Nomor 375/S.KP/CB/XI/1988, tanggal 11 November 1988, Pada Salah Satu Konsideran SK di sebutkan Muscab PMI Samarinda yang dilaksanakan saat itu adalah Muscab (sekarang disebut Muskot) ke III. Dengan demikian, dan berdasarkan dokumen yang ada bahwa masa bakti kepengurusan saat itu adalah 4 tahun, maka diperkirakan PMI Kota Samarinda Pertama kali dibentuk pada kisaran tahun 1980. Kepengurusan PMI Kota Samarinda, Masa bakti tahun 1988-1992, ketua dijabat oleh Ny. Hj. Nardhawaty Waris. Ny Hj. Nardhawaty Waris pada tahun 1991 mengajukan pengunduran diri sebagai ketua, hingga pada sisa masa bakti tahun 1988-1992, dilakukan pergantian ketua dan dijabat oleh Bapak Drs. H. Asran Bulkis (Sebelumnya Wakil Ketua).

Pergantian ketua PMI Kota Samarinda ini disahkan dengan SK Pengurus Daerah PMI KALTIM, nomor 257/SKPT/PD/1991, Tanggal 5 Agustus 1991. Selanjutnya, kepengurusan PMI Kota Samarinda masa bakti tahun 1992-1996 disahkan dengan SK Pengurus Daerah KALTIM, Nomor 053/S.KP/PENG/II/1993, Tanggal 18 februari 1993, dengan ketua dijabat oleh Bapak H. Djaelani Hakim,SH. Kepengurusan PMI Kota Samarinda masa bakti tahun 1997-2002 (masa bakti kepengurusan PMI berubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun), dengan ketua masih dijabat oleh Bapak H. Djaelani Hakim, SH, yang disahkan melalui SK Pengurus Daerah PMI KALTIM, Nomor 664/S.Kp/Peng/1997, Tanggal 16 April 1997. Dengan demikian, dan berdasarkan asumsi bahwa masa bakti kepengurusan saat itu adalah 4 tahun, maka diperkirakan PMI Kota Samarinda Pertama kali dibentuk pada kisaran tahun 1980. Adapun Kepengurusan PMI Kota Samarinda dari Tahun 2002-2024 sebagai berikut:

Kepengurusan PMI Kota Samarinda:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| a. Masa bakti 2002-2007 | Ketua Drs. H. Encik Idrus Samhazes |
| Surat Keputusan | Nomor 148/S. Kp/PD/PENG/PC/IV/2002 |

	Tanggal 26 April 2022
b. Masa bakti 2007-2012 Surat Keputusan	Ketua H. Marwoto Rasyim, M. Si <i>File belum ditemukan</i>
c. Masa bakti 2013-2018 Surat Keputusan	Ketua Ir. H. Fakhruddin Noor Nomor 02/Kep/IV.04.00/2013, Tanggal 4 Februari 2022
d. Perpanjangan masa kerja Masa bakti 2013-2018 Surat Keputusan	Ketua Ir. H. Fakhruddin Noor Nomor 01/IV.04.00/KEP/2018, Tanggal 16 juli 2018
e. Masa bakti 2019-2024 Surat Keputusan	Ketua Ir. H. Fakhruddin Noor Nomor 006/IV.04.00/KEP/2019, Tanggal 15 November 2019
f. Penunjukan Plt. Ketua Masa bakti 2019-2024 Surat Keputusan	Plt. Ketua Drs. Decky Zulkipli, M.Si Nomor 02/IV.04.00/KEP/2021, Tanggal 5 Mei 2021
g. Pengesahan Muskotlub Masa bakti 2019-2024 Surat Keputusan	Ketua Drs. Decky Zulkipli, M.Si Nomor 001/IV.04.00/KEP/2022, Tanggal 21 Februari 2022

Sumber: PMI Provinsi Kaltim. (2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat sejarah pembentukan dan susunan kepengurusan melalui daftar Surat Keputusan (SK) pengurus PMI Kota Samarinda dari masa kemasa sehingga kemungkinan PMI Kota Samarinda terbentuk kepengurusan pada tahun 1980 an hingga saat ini 2024. Dan Adapun tugas pokok dan fungsi:

1. Pengurus: Melaksanakan kegiatan pengurus, bertanggung jawab atas kegiatan kemarkasaan dan UPT UDD PMI kota Samarinda serta ketanggap darurat bencana di samarinda maupun di luar samarinda, serta berkoordinasi dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta dalam masa damai.
2. Staff markas PMI Kota Samarinda: Melaksanakan kegiatan dan administrasi kemarkasaan PMI kota samarinda termasuk dalam keadaan tanggap darurat bencana dan musibah. Serta tugas yang diberikan oleh pengurus PMI Kota Samarinda.
3. Pegawai Unit Donor Darah (UDD) PMI: melaksanakan kegiatan pengambilan darah, pendistribusian darah, pelestarian darah, peningkatan kapasitas pegawai dan penyebaran informasi tentang donor darah kepada masyarakat.
4. Relawan: melaksanakan 7 prinsip gerakan, melaksanakan tugas yang diberikan oleh PMI Kota Samarinda yang sesuai dengan peraturan yang ada, norma serta berusaha berstatus netral dan mendapatkan pembinaan serta pelatihan peningkatan kapasitas relawan.

Sumber Daya Manusia Palang Merah Indonesia Kota Samarinda

Sumber daya manusia yang ada di PMI Kota Samarinda dapat dikatakan sudah sangat cukup dan dapat dikatakan juga bahwa SDM PMI Kota Samarinda sangat mengandalkan relawan untuk menjalankan tugas yang akan di berikan oleh Pengurus PMI itu sendiri, dilihat dari Pengurus berjumlah 13 orang, Staf Markas berjumlah 6 orang, Tenaga Sukarela berjumlah 23 orang, Kops Sukarela berjumlah 297 orang, Palang Merah Remaja berjumlah 3.595 dan Relawan Donor Darah berjumlah 22.

ⁱ**Tabel 1 Sumber Daya Manusia PMI Kota Samarinda 2023.**

No	SDM	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Pengurus	8	5	13
2	Staff markas PMI	6	0	6
3	Pegawai UDD PMI	23	31	54
4	Relawan			
	Tenaga Sukarela	20	3	23
	Korps Sukarela	88	155	243
	Palang Merah Remaja (PMR)	728	2.764	3.492
5	Bubuhan Donor Darah	21	1	22
	Jumlah	894	2.959	3.853

Sumber: MIS PMI Kota Samarinda (2023).

Program Kerja Palang Merah Indonesia Kota Samarinda

Dari tabel program kerja PMI Kota Samarinda dapat dilihat bahwa selama tahun 2023, PMI memiliki program kerja berjumlah 54 program, kemudian selama tahun 2023 program kerja yang telah dilaksanakan berjumlah 35 program, dalam menjalankan program ini juga terkendala dengan anggaran yang terbatas sehingga terdapat prioritas program kerja yang harus di utamakan sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rencana dan keberhasilan.

Tabel 2 Program kerja tahun 2023

No	Kegiatan	Terlaksana (T)
TUJUAN STRATEGIS 1		
Memelihara reputasi dan meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional dan internasional		
1	Sosialisasi peraturan kepalangmerahan di Kelurahan / Sekolah melalui PMI Kecamatan	-
2	Sosialisasi peraturan kepalangmerahan kepada lembaga / Instansi yang ada di Kota Samarinda	-
3	Pembuatan media KIE Diseminasi Kepalangmerahan	-
4	Distribusi media KIE Diseminasi Kepalangmerahan di tingkat kelurahan / sekolah melalui PMI Kecamatan	-
5	Distribusi media KIE Diseminasi Kepalangmerahan bagi instansi / lembaga yang ada di kota Samarinda	-
6	Pelatihan diseminator kepalangmerahan	-
7	Diseminasi kepalangmerahan di sekolah / instansi / lembaga / LSM yang ada di kota Samarinda	T
8	Membangun WEB PMI Kota Samarinda	-
9	Melakukan pencatatan dan pengarsipan berita PMI Kota Samarinda yang dimuat di Media Massa dan Media Sosial	T
10	Melakukan pencatatan dan pelaporan orang yang dijangkau oleh pemberitaan di media massa tentang program / pelayanan PMI.	-
11	Meningkatkan jangkauan pengunjung media sosial PMI	T
12	Menerbitkan / memposting kegiatan / layanan PMI Kota Samarinda melalui Media Sosial / Media Massa secara rutin.	T
TUJUAN STRATEGIS 2		
Meningkatkan rekrutmen dan pembinaan relawan sebagai tulang punggung layanan kemanusiaan PMI, baik secara kuantitas dan kualitas		
1	Membentuk unit-unit KSR di Perguruan Tinggi	-
2	Bantuan Pendanaan Untuk Kegiatan KSR / TSR	T
3	Update Database PMR melalui SIM PMI dan Aplikasi SIAMO	T

4	Pelatihan Pelatih PMI (TOT)	-
5	Membentuk Unit PMR di sekolah yang belum memiliki PMR	T
6	Pelatihan Pembina PMR	T
7	Membangun sistem pelaporan kegiatan PMR	T
8	Menerima laporan kegiatan PMR minimal 2 kali dalam 1 tahun	T
9	Jumbara PMR	T
10	Membentuk Forum Remaja Palang Merah Indonesia (FORPIS)	T

TUJUAN STRATEGIS 3

Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia

1	Mensiagakan Relawan sebagai Petugas Posko PMI yang berfungsi 24 jam	T
2	Pelatihan Urban Search & Rescue (USAR) PMI	-
3	Mobilisasi Tim Satgana / USAR PMI Kota Samarinda dalam Operasi TDB di Indonesia	T
4	Penyampaian Laporan kebencanaan oleh petugas Posko terlaksana secara rutin dan periodik	T
5	Laporan layanan PMI Kota Samarinda tersampaikan secara periodik dan berjenjang	T
6	Laporan layanan PMI Kota Samarinda tersampaikan secara periodik dan berjenjang	T
7	Pelaksanaan Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat	-
8	Pelatihan Spesialisasi Perawatan Keluarga	-

TUJUAN STRATEGIS 4

Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan kepemimpinan yang kolektif kolegal dan berpedoman kuat pada Prinsip - prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah dengan tatakelola organisasi dan markas yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku

1	Musyawarah Kerja PMI Kota Samarinda Tahun 2023	-
2	Kunjungan pembinaan Pengurus PMI Kota Samarinda Ke Pengurus PMI Kecamatan	T
3	Pemberian Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Staf dan Relawan	T
4	Melaporkan hasil dan penggunaan donasi kepada masyarakat melalui media massa / media sosial	T
5	Penyusunan program kerja PMI tahun anggaran 2024	T
6	Pengiriman laporan semester ke PMI Provinsi Kaltim tepat waktu	T
7	Penyusunan laporan tahunan	T
8.	Pembayaran Honor & Gaji Staf Markas	T
9.	Pembayaran Tunjangan Kesehatan Staf Markas	T
10.	Tunjangan Kepala Markas	T

TUJUAN STRATEGIS 5

Meningkatkan kapasitas PMI di semua tingkatan dalam mengelola infrastruktur material dasar (sarana-prasarana) untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan

1	Pusdatin secara rutin membuat laporan-laporan kejadian bencana secara rutin dan berjenjang	-
2	Pengadaan barang bantuan untuk korban bencana sebagai persediaan minimum gudang PMI Kota Samarinda	T
3	Pengadaan perahu untuk penanganan bencana banjir	-
4	Pengadaan Tenda Pengungsian bagi korban bencana	T
5	Pengadaan peralatan Dapur Umum	T
6	Pengadaan Perlengkapan pertolongan pertama (AED, Neck Collar, Air Splint, First Aid Kit Mayor, Ekstrication device)	T

- 7 Pengadaan peralatan keselamatan tim (sepatu *safety*, helm, kacamata *safety*, *safety harness*, tali karmantel, webbing, dll) -

TUJUAN STRATEGIS 6

Meningkatkan kemandirian organisasi PMI secara berkesinambungan melalui kerjasama strategis disemua tingkatan dan inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif

1	Kerjasama dengan Balai K3 Samarinda untuk pelatihan P3K bagi Perusahaan	T
2	Kerjasama dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk pelaksanaan Bulan Dana PMI	T
3	Melaporkan hasil kerjasama PMI Kota Samarinda dengan Mitra ke PMI Provinsi Kalimantan Timur	T
4	Pelaksanaan Program bulan dana PMI Kota Samarinda selama 3 bulan	T
5	Melaporkan hasil bulan dana ke PMI Provinsi, mitra dan pemerintah kota samarinda.	-
6	Mengikutkan staf markas dalam pelatihan PSD yang dilaksanakan oleh PMI Provinsi / Pusat	-
7	Analisa / pemetaan stokeholders potensial yang dapat menjadi mitra / pendukung pendanaan PMI Kota Samarinda	T

Jumlah Program Kerja PMI Kota Samarinda Tahun 2023 **54**

Sumber : PMI Kota Samarinda (2023)

Sedangkan untuk memenuhi kinerja PMI Kota Samarinda memiliki sarana penunjang kegiatan sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan PMI Kota Samarinda, sarana ini juga didapatkan dengan berbagai cara antara lain dengan cara membeli menggunakan anggaran organisasi, hibah dari pemerintah dan donasi dari perusahaan sehingga perlunya sarana yang tersedia, tidak hanya menyediakan akan tetapi juga harus dilakukannya perawatan sarana secara berkala sehingga akan terjaganya sarana yang tersedia, contohnya ada sarana seperti motor dan mobil ambulance mengalami rusak yang pembiayaan perbaikan sangat mahal sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabel 3 Daftar Kendaraan Oprasional PMI Kota Samarinda

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mobil Ambulance AVP	1	Baik
2	Mobil Ambulance L300	1	Baik
3	Mobil Ambulance Kijang	1	Perbaikan
4	Mobil KIA	1	Baik
5	Mobil Izuzu Elev	1	Baik
6	Mobil <i>Pic Up</i> (Grand Max)	1	Baik
7	Motor Supra Fit	2	Rusak ringan
8	Motor Vega	1	Rusak
9	Motor Tander	1	Baik
10	Motor NMax	1	Baik
11	Motor Honda CRF Trail	2	Baik

Sumber: PMI Kota Samarinda (2024).

Tabel 4 Daftar Kendaraan Oprasional UDD PMI Kota Samarinda

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mobil Mini Bus Isuzu	2	Baik
2	Bis UDD	1	Baik

Sumber: PMI Kota Samarinda (2024).

Analisis Ruang Lingkup Palang Merah Indonesia (PMI) di Kota Samarinda

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data penelitian yang telah dirangkum dan diperoleh melalui hasil wawancara dengan *Key Informan* dan *Informan* sebagaimana telah dilakukan pada

halaman terdahulu tentang Organisasi Palang Merah Indonesia Kota Samarinda yang telah dibagi menjadi 7 fokus sebagai berikut:

1. Memberikan Bantuan Kepada Korban Konflik Bersenjata, Kerusuhan, Dan Gangguan Keamanan Lainnya.

Memberikan bantuan kepada individu atau masyarakat yang sedang dilanda konflik bersenjata, kerusuhan dan gangguan keamanan merupakan tugas dan mandat yang diberikan kepada Palang Merah Indonesia dari ICRC dan IFRC tidak terlepas juga Palang Merah Indonesia Kota Samarinda ikut turut serta melaksanakan, kejadian yang khususnya berada di samarinda sangat jarang ataupun bisa di bilang tidak memiliki potensi gangguan keamanan yang menyangkut dengan penggunaan senjata laras panjang, api dan sebagainya, tetapi masih dapat memiliki kemungkinan terjadinya kerusuhan atau konflik antar kelompok, sosial yang menyangkut antara suku dan golongan tertentu, termasuk demonstrasi dari masyarakat kepada pemerintah juga dapat menjadi sumber kerusuhan.

Palang Merah Indonesia Kota Samarinda melaksanakan memberikan bantuan kepada korban yang menjadi korban atau pelakunya sendiri dengan cara yang pertama memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan ambulance kepada korban konflik, Palang Merah Indonesia Kota Samarinda juga bekerja dengan profesional dengan mengutamakan prinsip kemanusiaan, kesamaan dan kenetralan dimana tidak ikut serta dalam kepentingan satu pihak tetapi menolong semua korban yang membutuhkan bantuan jika di perlukan, sehingga sangat perlu identitas melekat kepada personil yang bertugas di lapangan agar tidak terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan.

Pemberian bantuan kemanusiaan terhadap korban konflik merupakan bagian dari mandat yang diberikan PMI kepada PMI Kota Samarinda dimana untuk saat ini belum atau tidak ada terjadi konflik kekerasan yang menggunakan senjata tetapi ada beberapa kali konflik selisih paham yang terjadi antara kelompok-kelompok dalam intensitas kecil, tetapi konflik yang terjadi karena perkumpulan masa atau demo sering terjadi sehingga PMI turun dan membantu dalam hal tim kesehatan yang berupa pelayanan ambulance dimana tidak memihak kepada salah satu kelompok tertentu yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar PMI itu sendiri, PMI sendiri melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang utama adalah dari pihak keamanan TNI dan POLRI, tidak hanya memberikan bantuan kesehatan tetapi PMI juga memberikan pelayanan pemulihan keluarga kepada korban yang terpisah dari keluarganya dan memberikan dukungan sosial berupa terapi mental terhadap korban konflik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan bapak Decky Julkifli Selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kota Samarinda sebagai *Key Informan* di peroleh hasil:

“untuk korban konflik bersenjata kami belum pernah menangani di kota samarinda atau belum ada, tetapi untuk konflik sosial yang bersifat demo seperti kerusuhan kami memberikan bantuan kesehatan berupa tim medis dan ambulance, PMI Kota Samarinda sendiri memiliki orang atau pengurus yang melakukan tugas itu dalam hal pemberian bantuan walaupun tidak lepas juga ya dari bantuan TNI dan POLISI di mana melakukan keamanan kepada kami saat dilapangan, ya kami sudah melakukannya untuk saat ini”. (Wawancara 2 Jahuari 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Dedy Fitriyan selaku staff bidang Yankesos sebagai Informan di peroleh informasi sebagai berikut:

“Untuk PMI Kota Samarinda sendiri untuk saat ini belum pernah melakukan pelayanan bantuan untuk korban konflik bersenjata, tapi untuk korban kerusuhan saat aksi masa Demonstrasi PMI siaga melakukan pelayanan ambulance dengan

berkoordinasi bersama Polres Samarinda, untuk personil sendiri dari Staf markas dan relawan PMI Kota Samarinda” (Wawancara 5 Desember 2023).

2. Melaksanakan Pelayanan Darah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pelayanan darah, distribusi darah dan pelestarian darah adalah tugas yang diberikan pemerintah kepada PMI dari awal pembentukan organisasi ini, pelayanan darah ini juga merupakan salah satu sumber dana PMI atau UPT PMI di setiap cabang, pelayanan darah juga harus sesuai dengan peraturan yang ada dan juga mengikuti peraturan dan arahan dari *internal* yaitu PMI dan *eksternal* yaitu Dinas Kesehatan dengan demikian pelayanan darah sudah sesuai dengan peraturan, dilihat dari kegiatan UDD PMI Kota Samarinda sendiri sudah berjalan baik yang saat ini di rasakan oleh masyarakat penerima manfaat atau penerima pelayanan darah.

Pelayanan darah dan pelayanan pengambilan darah merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan kepada masyarakat karena banyaknya keperluan darah yang di minta dari masyarakat itu sendiri sehingga UDD PMI Kota Samarinda harus melakukan pencarian pendonor yang mau mendonorkan darahnya kepada UDD PMI Kota Samarinda, darah saat ini bukan sebagai carian saja tetapi sudah di anggap obat oleh pemerintah dimana setiap kegiatan UDD diawasi oleh BPOM dan Dinas Kesehatan yang menjadikan syarat khusus darah diperbolehkan di gunakan kepada masyarakat yang membutuhkan darah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan bapak Decky Julkifli Selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kota Samarinda sebagai Key Informan di peroleh hasil:

“Organiasi PMI ini berdasarkan keputusan pusat, dari PMI Pusat, PMI Provinsi, PMI Kota hingga PMI kecamatan itu ada strukturnya sehingga kita menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, PMI sesuai dengan dasar hukum yang ada dari pemerintah tugas PMI adalah melakukan penanganan penanggulangan bencana dan konflik selain itu juga melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pertolongan pertama dan pelayanan sosial lainnya berdasarkan visi dan misi PMI hingga pelayanan darah yang saat ini kita lakukan. Untuk pelayanan darah sendiri insyaallah masih dalam bimbingan dari BPOM, Menteri atau Dinas Kesehatan serta PMI Pusat untuk mendapatkan sertifikasi, karena di Indonesia ini baru ada 19 PMI yang memiliki sertifikasi dari BPOM darah sendiri di katagorikan sebagai obat sehingga pengambilan darah harus sesuai dengan BPOM”. (Wawancara 2 Januari 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Tompo Rejo selaku Kepala Tata Usaha Unit Donor Darah PMI Kota Samarinda sebagai *Informan* di peroleh informasi sebagai berikut :

“Jadi untuk melaksanakan kegiatan unit transfusi darah itu kita ada pedoman atau aturan yang harus kita ikuti salah satunya peraturan menteri kesehatan ada juga peraturan kepada BPOM tentang pengawasan obat dan kita melaksanakan kegiatan itu berdasarkan SPO yang sudah kita buat dan tetapkan, jadi semua kegiatan yang kita lakukan secara teknis dan non teknis kita mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan itu, untuk sekarang UTD PMI Kota Samarinda secara nasional juga setiap melaksanakan kegiatannya secara teknis berkaitan mutu darah kita di bimbing yang pertama UTD PMI Pusat kemudian yang kedua BPOM karena untuk saat ini memang produk darah itu sudah dianggap sebagai obat. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan mutu darah itu di pantau atau berpedoman pada cara pembuatan obat yang baik sesuai dengan BPOM, sehingga disitulah peran BPOM kepada UTD PMI Kota

Samarinda, semua kegiatan UTD PMI Kota Samarinda akan dilaporkan secara berjenjang utamanya kepada UTD PMI Pusat kemudian tembusan kepada pengurus PMI Kota Samarinda, Pengurus PMI Provinsi Kalimantan Timur dan Pengurus PMI Pusat”. (Wawancara 22 Desember 2023).

3. Melaksanakan Pembinaan Relawan

Pembinaan relawan Palang Merah Indonesia Kota Samarinda merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi misi dan tujuan strategis PMI karena relawan merupakan ujung tombak dari setiap pelayanan PMI, pembinaan relawan dilakukan kepada unit atau perorangan yang merupakan bagian dari PMI sendiri, pembinaan relawan dilaksanakan dari jenjang bawah dari anggota PMR, KSR, TSR dan anggota yang terkait dengan kepalangmerahan, pelatihan itu sendiri memiliki jenjangnya masing-masing dari awal dinamakan orientasi kepalangmerahan, pelatihan dasar 120 jam, spesialisasi, satgana dan juga pelatihan atau peningkatan kapasitas relawan pelatihan peningkatan kapasitas ini dilakukan setiap tahunnya secara rutin dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan bapak Decky Julkifli Selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kota Samarinda sebagai *Key Informan* di peroleh hasil :

“Iya kita selalu melakukan pembinaan kepada relawan, terlebih kami memiliki staff khusus yang melakukan pembinaan relawan dari tingkat PMR hingga TSR apa lagi tahun depan ini semoga pendanaan kita ini cukup kita akan melakukan pembinaan relawan bukan hanya untuk relawan PMI kita juga akan melakukan pembinaan relawan kepada relawan yang ada dikota samarinda khususnya dalam pertolongan pertama”. (Wawancara 2 Januari 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Dedy Fitriyan selaku staff bidang Yankesos sebagai *Informan* di peroleh informasi sebagai berikut:

“Melakukan pembinaan relawan dan pelatihan meningkatkan kapasitas relawan juga Sudah dilakukan kepada mahasiswa yang tergabung dalam Korps Sukarela dan Tenaga Sukarela serta anak-anak sekolah yang tergabung dalam PMR. Biasanya dilakukan di sekolah, kampus dan markas, ada juga saat kegiatan tertentu” (Wawancara 5 Desember 2023).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Budi Harianto selaku staff bidang Diklat dan Humas sebagai *Informan* di peroleh informasi sebagai berikut :

“Termasuk dalam mengadakan pelatihan mulai dari rekrutmen kemudian orientasi dan peningkatan kapasitas relawan dan lain lain pasti ada dilaksanakan, sasaranya lebih banyak kepada PMR kaderisasi disekolah kemudian kepada teman-teman korp sukarela itu bagian dari kekuatan PMI, dan untuk biaya saat ini PMI tidak memungut biaya” (Wawancara 5 Desember 2023).

4. Pendidikan Dan Pelatihan Yang Berkaitan Dengan Kepalangmerahan

Palang Merah Indonesia Kota Samarinda sudah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kepalangmerahan dari jenjang bawah melalui Palang Merah Remaja Indonesia di sekolah yang memiliki ekstrakurikuler PMR, kepada masyarakat melalui SIBAT, pengurus serta relawan PMI, Pendidikan dan pelatihan kepalangmerahan dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan juga untuk menguatkan serta meningkatkan kebanggaan kepada organisasi, semua ini juga dilakukan sejalan dengan pembinaan relawan yang ada bisa dibilang jika melaksanakan pembinaan relawan itu juga merupakan pendidikan serta pelatihan tentang kepalangmerahan, sehingga dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dari kegiatan itu dapat dikatakan pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik sehingga hanya menambahkan masukan yang ada sesuai dengan

keadaan saat dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan bapak Decky Julkifli Selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kota Samarinda sebagai *Key Informan* di peroleh hasil :

“Pasti tentu Sumber Daya Manusia itu modal utama dari pelaksanaan kegiatan harusnya seluruh relawan PMI memiliki *skill*, kemampuan serta tenaga yang cukup sehingga itulah yang membedakan relawan PMI dengan relawan yang lainnya di luar PMI dalam kemampuan, di PMI sendiri kami selalu memberikan pendidikan yang berkaitan dengan kepalangmerahan mulai dari masa orientasi hingga pelatihan lainnya yang ada di PMI alhamdulillah kami dari PMI sendiri memiliki orang yang memiliki atau berkompeten dalam bidangnya sehingga kami tidak membutuhkan bantuan dari PMI Kota lain dalam pembinaan kepalangmerahan pada dasarnya, saya rasa sudah baik kami melakukannya”.(Wawancara 2 Januari 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Dedy Setiawan selaku staff bidang Relawan dan PMR sebagai *Informan* di peroleh informasi sebagai berikut :

“Iya Pasti ada, pendidikan kepalangmerahan harus dilakukan dipmi misalkan salah satu contohnya dari setiap calon anggota remaja atau PMR maupun relawan wajib mengikuti orientasi kepalangmerahan disitulah pemberian penguatan pemahaman materi tentang jiwa kepalangmerahan dari setiap anggota PMI” (Wawancara 5 Desember 2023).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Budi Harianto selaku staff bidang Diklat dan Humas sebagai *Informan* di peroleh informasi sebagai berikut :

“Iya sudah dalam setiap pelatihan atau dalam peningkatan kapasitas kepada relawan termasuk juga kepada pengurus materi-materi kepalang merahan selalu di masukan dalam kegiatannya jadi itu juga bagian dari mandat internasional bahwa palang merah indonesia harus selalu menggaungkan tentang kepalang merahan” (Wawancara 5 Desember 2023).

5. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepalangmerahan Penanganan Musibah Dan Atau Bencana

Menyebarkan informasi juga merupakan bagian dari penyampaian laporan kepada masyarakat juga untuk saat ini pelaporan PMI sendiri dilakukan setiap hari dengan cara melaporkan kegiatan kepada PMI Provinsi yang akan di teruskan kepada PMI Pusat, penyebaran informasi ini juga adalah merupakan tugas kehumasan PMI untuk menjaga kenetralan organisasi dan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa PMI merupakan organisasi kemanusiaan.

Penanganan musibah dan bencana merupakan tugas utama yang di berikan kepada PMI dari ICRC dan IFRC penanganan musibah dan bencana akan didukung penuh oleh PMI pusat sehingga pemberian bantuan kemanusiaan dapat tersebar kepenjuru wilayah di negara. Koordinasi yang berkaitan tentang penanganan musibah dan bencana sendiri harus dilaporkan kepada atasan PMI yang kemudian akan dibantu untuk berkoordinasi kepada pihak terkait dalam hal ini adalah pemerintah setempat, apa saja yang diperlukan sehingga PMI dapat meidentifikasi kebutuhan atau bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan (contoh 1 : jika terjadi kebakaran maka PMI akan menyiapkan kebutuhan berupa tenda hunian sementara, Famili Kit, serta peralatan dapur dan bahan dapur),(contoh 2 : jika terjadi banjir maka PMI akan memberikan bantuan kebutuhan dapur, obat-obatan, serta air bersih layak pakai). Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan bapak Decky Julkifli Selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kota Samarinda sebagai *Key Informan* di peroleh hasil :

“Iya kami sudah melakukannya apa lagi sekarang sudah ada teknologi sosial media dimana masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang cepat kami memiliki staff khusus kehumasan yang melakukan penyebarluasan informasi kegiatan PMI Kota Samarinda melalui WA grup, IG, FB, Twiter dan juga YouTube dilihat dari pelayanan kesehatan, pelayanan ambulance, donor darah, kesiapsiagaan bencana dan juga kami melakukan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh PMI Kota Samarinda” (Wawancara 2 Januari 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Dedy Setiawan selaku staff bidang Relawan dan PMR sebagai *Informan* di peroleh informasi sebagai berikut :

“Di setiap kegiatan saat ini karena sudah memiliki teknologi yang bagus, seperti akun-akun sosial media yang dimiliki PMI samarinda karena itu salah satu alat atau sarana bagi PMI kota samarinda melakukan penyebaran informasi khususnya kegiatan-kegiatan kepalangmerahan dan pelayanan-pelayanan lainnya baik itu pelayanan kesehatan maupun upaya penanggulangan bencana yang dilakukan PMI kota samarinda” (Wawancara 5 Desember 2023).

6. Pelayanan Kesehatan Dan Sosial

Pelayanan kesehatan dan sosial merupakan salah satu tugas yang diberikan kepada Palang Merah Indonesia Kota Samarinda dimana dalam setiap pelayanan yang menjadi ujung tombak adalah Relawan sehingga pelayanan akan berjalan dengan baik dan lebih maksimal melakukan pelayanan kesehatan dan sosial Pelayanan kesehatan dan sosial merupakan salah satu kegiatan berupa pemberian pelayanan kesehatan, pelayanan darurat dan juga pelayanan pertolongan pertama. Pertolongan pertama juga merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dimana pemberian pelatihan pertolongan pertama diberikan kepada relawan PMI, relawan diluar PMI dan kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan tidak hanya itu saja tetapi juga kepada himbauan dan promo kesehatan promo menjaga kesehatan dan sebagainya dengan tidak terlepas berkerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan bapak Decky Julkifli selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kota Samarinda sebagai *Key Informan* di peroleh hasil :

“YanKeSos sendiri kami memiliki staff khusus yang melakukan ini dimana tugasnya melakukan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara gratis akan tetapi untuk pelayanan yang memiliki benefit atau pemasukan dari peminta pelayanan seperti acara even kegiatan atau lainnya kami memiliki jumlah tertentu sesuai dengan permintaan biasanya relawan yang kami turunkan, tetapi kalau itu yang membutuhkan pelayanan adalah masyarakat dan juga dalam musibah kami lakukan pelayanan secara gratis, pelayanan sosial ini juga bagian dari pemberian bantuan kepada masyarakat ataupun jika terjadi bencana juga, untuk saat ini dari tahun kami melakukan pelayanan ambulance 24 jam dari tahun 2020 alhamdulillah masih berjalan di situlah kepedulian PMI Kota Samarinda ini kepada masyarakat yang membutuhkan, contohnya kemarin kami ikut membantu dalam penanganan banjir bandang di Kalimantan Selatan tahun lalu kami dating juga menyerahkan bantuan dari masyarakat yang berdonasi melalui PMI Kota Samarinda”.(Wawancara 2 Januari 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Dedy Fitriyan selaku staff bidang Yankesos sebagai *Informan* di peroleh informasi sebagai berikut:

“Sudah melakukannya Biasanya lembaga dan badan mengirimkan surat permohonan ke PMI Kota Samarinda untuk biayanya tergantung dengan kegiatan/even yang dilaksanakan dan banyaknya personil yang dilibatkan dan ada juga jasa ambulance emergensi yang tidak dipungut biaya atau gratis”. (Wawancara 5 Desember 2023).

7. Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Kepalangmerahan

Peran masyarakat dalam setiap kegiatan kepalangmerahan merupakan tindakan yang diberikan masyarakat kepada organisasi PMI dimana PMI sendiri merupakan organisasi kemanusiaan yang diberikan kepada individu yang memerlukan bantuan kemanusiaan, PMI juga melaksanakan oprasi tanggap darurat yang membutuhkan bantuan keturutsertaan masyarakat dalam membantu mendistribusikan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat, PMI Kota Samarinda sendiri melaksanakan program bulan dana pada tahun 2023 dimana untuk melihat peran aktif masyarakat dalam berdonasi dan memberikan bantuan kepada PMI, bulan dana ini juga dilakukan di masyarakat, sekolah, kantor dan tempat wisata dimana secara langsung masyarakat juga percaya serta mengetahui bahwa PMI ada untuk membantu sesama umat manusia. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan bapak Decky Julkifli Selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kota Samarinda sebagai *Key Informan* di peroleh hasil :

“alhamdulillah dikit demi sedikit dan insyaallah akan terus berjalan kepedulian masyarakat kepada kemanusiaan terus meningkat setelah melakukan pembinaan-pembinaan, penyuluhan yang dilakukan oleh PMI Kota Samarinda salah satunya kegiatan sibat untuk saat ini baru dua kecamatan yang aktif melakukan pembinaan sibat walaupun semua kecamatan di kota samarinda sudah kami lakukan pembentukan pengurus PMI Kecamatan-kecamatan, kemudian relawan yang ada dari masyarakat sekitar kecamatan karena mereka yang mengalami dan juga bagian dari masyarakat sehingga masyarakat memiliki atau timbul rasa kemanusiaan terhadap sesame walaupun mereka adalah korban, sehingga jika terjadi bencana sibat akan kami turunkan tetapi sibat merupakan bawahan atau anggota dari kecamatan, walau sudah terbentuk tetapi belum maksimal kami dari pihak PMI Kota Samarinda sendiri sudah berusaha akan meningkatkan kepedulian masyarakat itu dalam kegiatan yang akan dilakukan di tahun depan, ya manfaatnya manusia itu akan lebih bermanfaat sebesar-besarnya kepada manusia lain”(Wawancara 2 Januari 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Dedy Setiawan selaku staff bidang Relawan dan PMR sebagai *Informan* di peroleh informasi sebagai berikut:

“Iya masyarakat sudah melakukan peran nya dalam kepalangmerahan walau belum maksimal, banyak masyarakat salah satunya ada yang kita lakukan namanya bulan dana, bulan dana itu bagaimana kami PMI mengajak masyarakat untuk berdonasi melalui PMI dimana hasil donasi yang terkumpul itu akan kami kembalikan kemasyarakat melalui kegiatan penanggulangan bencana atau pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PMI, nah dengan masyarakat berdonasi melalui PMI di bulan dana tersebut berarti masyarakat secara tidak langsung sudah terlibat dalam pelayanan kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI adapun kegiatannya bisa di cek di IG palang merah Indonesia Kota Samarinda atau kegiatan yang dilakukan <https://setda.samarindakota.go.id/berita/bulan-dana-pmi-perumdam-samarinda-berhasil-himpun-donasi-rp-905594000> ” (Wawancara 5 Desember 2023).

Berdasarkan pembahasan yang sudah di deskriptif kan diatas dengan ini maka dapat diambil sebuah benang merah bahwa Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda berperan penting sebagai organisasi kemanusiaan yang berbasis pada prinsip-prinsip netralitas, kemandirian, dan kemanusiaan. PMI Kota Samarinda telah menunjukkan peran signifikan dalam memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusakan, dan gangguan keamanan. Tindakan ini mencerminkan peran PMI sebagai organisasi yang mengimplementasikan mandat berdasarkan hukum internasional dan prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC). Namun, efektivitas koordinasi dengan aparat keamanan dan

ketersediaan fasilitas pendukung seperti ambulans dapat ditingkatkan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efisien (Haryanto, 2020). Selain itu, Pelayanan darah yang dilakukan oleh PMI telah memenuhi standar peraturan perundang-undangan. Pengawasan oleh PMI Pusat, Kementerian Kesehatan, dan BPOM memastikan distribusi darah sesuai standar keamanan dan kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Meski demikian, tantangan terkait keterbatasan suplai darah dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya donor darah masih menjadi perhatian. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang donor darah dapat diatasi melalui kampanye berbasis komunitas (Sutrisno, 2018).

Hal penting selanjutnya yaitu adanya rekrutmen dan pembinaan relawan merupakan aspek penting dalam organisasi berbasis komunitas seperti PMI. Pelaksanaan pelatihan dasar dan orientasi yang dilakukan setahun sekali menunjukkan komitmen terhadap pengembangan kapasitas relawan. Namun, penjadwalan pelatihan yang lebih intensif dan kolaborasi dengan sektor pendidikan dapat memperkuat keberlanjutan program relawan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Selain itu, pengakuan atas kontribusi relawan melalui program penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas mereka. Peran media sosial telah menjadi alat utama PMI dalam menyebarkan informasi kegiatan mereka. Namun, berdasarkan temuan, akses informasi oleh masyarakat masih terbatas. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya strategi komunikasi digital yang inklusif. Literasi digital masyarakat yang rendah juga berkontribusi terhadap minimnya partisipasi publik dalam program PMI (Setiawan et al., 2022). PMI dapat memanfaatkan pendekatan komunikasi partisipatif untuk menjangkau lebih banyak kalangan, termasuk melalui media tradisional seperti radio lokal atau melalui tokoh masyarakat. Terakhir, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepalangmerahan masih belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan partisipatif yang lebih inklusif, seperti program berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam simulasi tanggap bencana atau edukasi kepalangmerahan. Menurut kajian Supriyadi (2019), keterlibatan masyarakat yang lebih intensif dapat meningkatkan efektivitas kampanye donasi kemanusiaan, termasuk melalui program seperti *Bulan Dana PMI*. Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana donasi dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap PMI. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara NGO dan pemerintah lokal dapat mempercepat proses tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana (Fikri & Abdullah, 2021). Selain itu, penguatan jaringan antar NGO di tingkat lokal, nasional, dan internasional dapat meningkatkan daya saing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai “Analisis Ruang Lingkup Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) Sebagai Non Governmental Organization (Ngo’s) Di Kota Samarinda” yaitu Pertama, Pemberian bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusakan dan gangguan keamanan sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda itu sendiri berupa memberikan bantuan pelayanan pertolongan pertama kepada korban terluka, pemberian bantuan ambulance serta berkoordinasi dengan petugas keamanan. Kedua, Pelayanan darah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selalu diawasi oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga pelayanan darah, pengambilan darah dan pendistribusian darah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan bersama. Ketiga, Pelaksanaan pembinaan relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda sudah baik dilakukan kepada relawan dilihat dari pelaksanaan rekrutman relawan, orientasi relawan, pelaksanaan pendidikan dasar serta pelatihan lainnya sudah dilakukan minimal satu tahun sekali. Keempat, Penyebarluasan informasi kegiatan penanganan musibah dan pemberian bantuan sudah dilakukan oleh Palang

Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda melalui sosial media yang saat ini dimiliki tetapi tidak semua masyarakat mendapatkan informasi tersebut dilihat dari sampel masyarakat yang sudah diwawancarai tetapi tidak mengetahui tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kelima, Peran masyarakat dalam kegiatan kepalangmerahan sudah dilakukan akan tetapi masih belum maksimal karena Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda masih mengupayakan memberikan ruang untuk masyarakat berperan dalam kepalang merahan seperti mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan kepalangmerahan dan melakukan donasi kemanusiaan. Namun donasi yang dilakukan belum maksimal dan juga masih banyak masyarakat belum mengetahui bahwa Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda melakukan *open* donasi melalui program Bulan Dana PMI. Keenam, Peran Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda sebagai Organisasi *Non* Pemerintah sudah dilakukan dalam hal penyebaran informasi tentang kepalangmerahan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian bantuan, memberikan pelayanan darah, melaksanakan kesiapsiagaan bencana, melaksanakan ketanggap darurat bencana dan tugas lainnya yang diberikan atau bekerjasama dengan pemerintah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Akhirnya kami menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh tim peneliti dan pihak-pihak terkait seperti Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda. Berkat dukungan yang baik kami tim peneliti berhasil memperoleh temuan dari hasil penelitian yang komperhensif sehingga harapannya penelitian ini mampu memiliki pengaruh yang positif terhadap keilmuan yang relevan dan juga harapannya hasil penelitian ini dapat dimasukkan dalam karya penelitian yang diakui secara reputatif. Dan tidak lupa juga ucapan terimakasih di berikan kepada dosen pembimbing, keluarga dan pihak yang membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aall, P., & Helsing, J. W. (2021). Non-Governmental Organizations. *Responding to Violent Conflicts and Humanitarian Crises: A Guide to Participants*, 53-87.
- Azizah, Z. (2023). *Peran International Committee of the Red Cross (Palang Merah Internasional) Dalam Misi Kemanusiaan Terhadap Korban Konflik Di Republik Demokratik Kongo Tahun 2018-2022* (Doctoral dissertation, UPN "Veteran" Yogyakarta).
- Beigbeder, Y. (2023). *The Role and Status of International Humanitarian Volunteers and Organizations: The Right and Duty to Humanitarian Assistance* (Vol. 12). BRILL.
- Canton, H. (2021). International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. In *The Europa Directory of International Organizations 2021* (pp. 631-639). Routledge.
- Cicurel, A. (2023). *Red Cross Violates Mission of Impartial Humanitarian Assistance-What Happened?*
- Creswell, J. W. (2002). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: KIK.
- Forsythe, D. P. (2024). *The Contemporary International Committee of the Red Cross: Challenges, Changes, Controversies*. Cambridge University Press.
- Fikri, A., & Abdullah, S. (2021). *Peran NGO dalam Penanganan Bencana di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Haryanto, T. (2020). "Efisiensi Koordinasi Antar Stakeholder dalam Kesiapsiagaan Bencana." *Jurnal Kemanusiaan*, 12(1), 45-56.
- Izotov, V. S., & Obydenkova, A. V. (2023). Geopolitical Games in Eurasian Regionalism: Ideational Interactions and Regional International Organisations. In *Global Governance and Interaction between International Institutions* (pp. 4-28). Routledge.
- Jumaboevich, K. S. (2020). Relationship of the Government and Civil Society. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 117-119.

- Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S. (2020). *Non-Governmental Organizations and Development*. Routledge.
- Muhrel, L. (2024). The Authority of the International Committee of the Red Cross. In *The Authority of the International Committee of the Red Cross* (pp. 26-53). Brill Nijhoff.
- Okada, A., Ishida, Y., Yamauchi, N., Grönlund, H., Zhang, C., & Krasnopolskaya, I. (2021). Episodic Volunteering in Sport Events: A Seven-Country Analysis. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 1-13.
- Prasetyo, B., & Wulandari, N. (2021). "Manajemen Relawan dalam Organisasi Sosial." *Journal of Community Empowerment*, 8(2), 123-134.
- Reuter, P. (2024). *International Institutions*. Taylor & Francis.
- Sardà, M. R. G. (2023). Humanitarian Neutrality and Language at the International Committee of the Red Cross. *Revista de Llengua i Dret*, (80).
- Sengupta, S., & Joshi, R. (2024). 'It's Simply Intrinsic': Exploring Motivations of Full-Time Volunteers in Humanitarian and Spiritual NGO of India. *Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance*, 48(2), 164-180.
- Setiawan, M. A., et al. (2022). "Strategi Komunikasi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Komunikasi Publik*, 10(3), 89-104.
- Suardi, S., Azmi, F., & Daulay, N. K. (2023). Perkembangan International Standard of Organization. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 2625-2630.
- Supriyadi, A. (2019). "Keterlibatan Komunitas dalam Kampanye Kemanusiaan." *Jurnal Sosial*, 15(4), 67-80.
- Sutrisno, D. (2018). *Donor Darah dan Tantangan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Usiono, U., Hutasuhut, A. A., Apriani, S., Dalimunthe, S. Q., & Ayuni, S. (2023). Palang Merah Indonesia Menjadi Salah Satu Organisasi Sosial di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 60-65.
-